

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada pemerintah daerah yang berada di provinsi Jawa Barat. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan *nonprobability sampling*. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi kalsik yang terdiri dari uji normalitas, uji Autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji T-test, uji F-test, analisis regresi linier berganda, dan koefisien determinasi. Banyaknya populasi dan sampel penelitian ini adalah 27 LKPD. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dengan sumber yang diperoleh melalui hasil data yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada pemerintah daerah yang berada di provinsi Jawa Barat. Besarnya pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sebesar 21,9%, sedangkan besarnya pengaruh temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sebesar 7,0%. Sedangkan, besarnya pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan secara simultan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sebesar 28,9%, dan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini seperti misalnya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

**Kata Kunci:** Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Temuan Ketidakpatuhan PEMDA atas Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK.

## ***ABSTRACT***

This study aims to find out how much influence the findings of the internal control system weaknesses and the findings of non-compliance WILL, over legislation against the audit opinion of the financial statements of local government by the CPC on the local government in the province of West Java. The Research approach used in this study is a descriptive analysis and secondary data by using verificative. The sampling technique used was with nonprobability sampling. Statistical analysis used in this study is testing the assumptions kalsik consisting of normality test, Autocorrelation test, multikolonieritas test, test, test the heteroskedasitas T-test, F-test test, multiple linear regression analysis, and the coefficient determination. The number of population and sample the study was 27 LKPD. Sampling sampling method using saturated with resources obtained through the results of data obtained from the Examination of Finance Republic of Indonesia West Java Representation.

Based on the results of research conducted can be noted that the findings of the weakness of the system of internal control and compliance findings WILL, upon influential legislation significantly to the audit opinion of the financial statements of the Government the area by the CPC on local governments who are in West Java province. The magnitude of the influence of the system of internal control weaknesses findings against the audit opinion on the financial statements of local government by the CPC amounted to 21.9%, while the magnitude of influence over LOCAL GOVERNMENT non-compliance findings legislation against the audit opinion local government financial reports by the CPC amounted to 7.0%. Meanwhile, the magnitude of the influence of the weakness of the system of internal control findings and findings of non-compliance ADMINISTRATION over legislation simultaneously against the audit opinion on the financial statements of local government by the CPC of 28.9%, and the rest of 69.8% were influenced by other factors not examined by the author in this study such as compliance with government accounting standards and adequacy of disclosure (adequatedisclosures).

Keywords: internal control System Weaknesses Findings, findings of non-compliance over LOCAL GOVERNMENT Legislation, the Audit opinion on the financial statements of local government by the CPC.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Arens, Alvin. A., Randal, J. Elder And Mark, Beasley.S., yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Jilid I, Edisi Kedua belas. Jakarta, Penerbit: Erlangga.
- Ardiyos. 2007. Kamus Standar Akuntansi. Jakarta, Penerbit: **Citra Harta Prima**.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. Jakarta. Penerbit: BPK RI
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung, Penerbit: BPK RI
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Jakarta, Penerbit: BPK RI
- Baridwan, Zaki. 1999. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta, Penerbit: BPFE
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. 2013. *Internal Control – Integrated Framework*. New York: *AIGPA's Publication Division*.
- Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi: Bandung, Penerbit: PT Rafika Aditama Anggota Ikapi.
- Gozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N.,2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., buku 2, Edisi 5, Jakarta, Penerbit: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. PSAK No. 1 Tahun 2009 tentang Komponen Laporan Keuangan Lengkap, Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta: IAI
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Penerbit: Andi

- Mashuri dan M. Zainudin. 2009. Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung, Penerbit: Refika Aditama.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor, Penerbit, Penerbit: Ghalia Indonesia
- Santosa, Singgih. 2001. Statistik Parametrik, Buku Latih SPSS. Jakarta., Penerbit: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Santoso, Singgih. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta, Penerbit: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung, Penerbit: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, Penerbit: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung, Penerbit: Alfabeta.
- Tobing, Riduan dan Nirwana. 2004. Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta, Penerbit: Atalya Releni Sucedo.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika dan statistika dengan Eviews. Yogyakarta, Penerbit: UPP STIM YKPN

### **Sumber Jurnal dan Skripsi:**

- Fatimah, Desi. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1., 1-15.
- Munawar, 2016. Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 05, No. 02., 57-67.
- Nur, Amalia, 2017, Jumlah temuan audit atas SPI dan Jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini LKPD Pemerintah kota/ kab di Jawa Barat, *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, Volume 9, No 1., 12-19

- Rosadi Samsul, dkk, 2017, Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan, Status Daerah, Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Timur 2013, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, No 02., 99-111.
- Rudiansyah, Jumadi, 2017, Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera, Tesis. Lampung: Universitas Lampung.
- Safitri, Ni Luh Ketut Shanti Antik dan Darsono, 2014, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 05, No. 01., 1-12.
- Setiawan Rofi Arif. 2017 pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini LKPD Sulawesi Selatan. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sipahutar, Hottua dan Siti Khairani. 2013. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Terpublikasi di <http://eprints.mdp.ac.id>., di akses pada tanggal 26 Januari 2018.
- Pujiona, Dodik Slamet, 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah, *Bisma Journal Bissnis dan Manajemen*, Volume 10, No. 1., 68-81.
- Widodo, Oka Purnawan dan Sudarno, 2017. Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 06, No. 01., 1-9.

#### **Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

- Menteri Dalam Negeri. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas LKPD Sistem Pengendalian Internal.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Presiden Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 dan 5

Presiden Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Presiden Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Presiden Republik Indonesia. 2006. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Presiden Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

Presiden Republik Indonesia. 2004 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

#### **Sumber Website / Internet:**

<http://www.bpk.go.id> diakses pada tanggal 07 Januari 2018

<https://katadata.co.id/berita/2017/05/22/pertahankan-predikat-wajar-bpk-minta-14-temuannya-ditindaklanjuti> diakses pada tanggal 18 April 2018

<http://www.beritasatu.com/hukum/124341-bpk-masih-temukankelemahan-sistem-pengendalian-intern-di-3-kementerian.html> diakses pada tanggal 19 April 2018